

# BAB 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar belakang

Saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan, baik itu proyek jalan, gedung dan jembatan. Sektor bangunan dan konstruksi Indonesia sedang mengalami masa pertumbuhan yang berkelanjutan, baik peningkatan dari pihak swasta maupun pemerintah. Sektor konstruksi juga merupakan salah satu sektor terkuat yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia (Hartono, 2022). Studi yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor konstruksi menduduki peringkat kelima sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi negara Indonesia.

Mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, perkembangan ekonomi tidak luput dari yang namanya inflasi dan menyebabkan segala sektor kehidupan berubah. Menurut BPS pada September 2022 telah terjadi inflasi, terjadinya inflasi ini diakibatkan terjadinya kenaikan harga BBM dan berimbas kepada harga jual semua produk yang ada di Indonesia. Salah satu sektor yang terimbas akibat kejadian ini ialah sektor konstruksi dalam hal pembiayaan proyek konstruksi.

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Tabel 1.1 Harga Bahan Bakar Minyak tahun 2022

NO	Bulan	Solar Subsidi	Solar non subsidi (Dexlite)
1	Januari	Rp5.150	Rp7.506
2	Februari	Rp5.150	Rp9.500
3	Maret	Rp5.150	Rp12.150
4	April	Rp5.150	Rp14.250
5	Mei	Rp5.150	Rp14.950
6	Juni	Rp5.150	Rp13.700
7	Juli	Rp5.150	Rp12.650
8	Agustus	Rp5.150	Rp13.150
9	September	Rp6.800	Rp13.950
10	Oktober	Rp6.800	Rp17.200
11	November	Rp6.800	Rp16.950
12	Desember	Rp6.800	Rp18.000

Sumber : [www.pertamina.com](http://www.pertamina.com)

Kenaikan BBM pada September tahun 2022 di Indonesia dipicu karena kenaikan harga minyak mentah di dunia dan ICP ( Indonesian Crude Price ). Kondisi inilah yang menyebabkan meningkatnya besaran beban APBN. Fakta di lapangan pun menilai pemberian subsidi BBM tidak tepat sasaran. Berdasarkan data Kemenkeu total kompensasi pertalite adalah 93,5 triliun, 80,4 triliunnya di konsumsi oleh rumah tangga dan 13,1 triliun dinikmati oleh dunia usaha. Dari 80,4 triliun yang dikonsumsi rumah tangga, hanya sekitar 20% saja yang dinikmati oleh rumah tangga kurang mampu (Kemenkeu, 2022). Pada dasarnya harga BBM untuk non subsidi selalu berubah dari waktu ke waktu, berbeda dengan BBM subsidi yang dapat dilihat pada tabel 1.1. Setiap bulannya harga BBM non subsidi akan berubah ubah mengikuti perkembangan inflasi Indonesia (Indonesian Crude Price) dan harga minyak mentah dunia. Maka dari itu perkembangan harga BBM non subsidi setiap bulannya dapat kita lihat pada website resmi pertamina. Tidak hanya mengikuti perkembangan setiap bulannya, harga BBM non subsidi ini berbeda beda untuk setiap daerah yang ada Indonesia. Untuk BBM subsidi memiliki harga yang relatif sama di setiap wilayah Indonesia, sedangkan untuk BBM non subsidi memiliki harga yang berbeda beda di setiap wilayah Indonesia.

Dalam dunia konstruksi terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar dalam biaya produksi. Faktor-faktor tersebut antara lain harga material, upah tenaga kerja, inflasi, biaya hidup, upah tenaga kerja dan transportasi material. Kenaikan BBM ini berdampak secara langsung maupun tak langsung terhadap biaya konstruksi. Secara langsung akan berpengaruh terhadap bahan bakar yang digunakan selama proses konstruksi, sedangkan secara tak langsung kenaikan harga BBM akan mempengaruhi harga material, transportasi material, inflasi, dan biaya hidup staff selama proyek berlangsung (Setiawan, Yusuf M, Sugiyarto, 2013).

Apabila terjadinya perubahan harga maka harga perkiraan sendiri (HPS) pada rencana anggaran biaya proyek konstruksi sangat perlu diperhatikan mengingat rumus sederhana dari HPS adalah sebagai berikut

Harga Satuan	= Analisa harga x keuntungan wajar
HPS sebelum PPN	= Harga satuan x volume
HPS setelah PPN	= HPS sebelum PPN + (11% x HPS sebelum PPN).

Kenaikan harga barang dan jasa yang melonjak drastis tentunya perlu diperbarui sesuai harga yang beredar terkini, tetapi jika kenaikan harga barang dan jasa tidak begitu melonjak dan tidak begitu mempengaruhi HPS maka HPS tidak perlu diperbarui (Kemenkeu, 2014).

Dari masalah diatas maka perlu dilakukan penelitian untuk membuat sistem penilaian yang dapat membantu dalam mengetahui pengaruh kenaikan harga BBM non subsidi terhadap faktor-faktor biaya konstruksi dan mengetahui komponen-komponen pekerjaan konstruksi yang paling terpengaruh dampak kenaikan harga BBM serta pengendaliannya. Untuk itu peneliti akan membandingkan proyek konstruksi gedung, jalan dan SDA untuk setiap item pekerjaan yang menggunakan alat berat. Dari perbandingan ketiga jenis konstruksi tadi dapat dilihat jenis konstruksi mana yang sangat berdampak terhadap kenaikan BBM (Solar non subsidi) di setiap masing masing item pekerjaan tertentu. Maka dari itu peneliti memerlukan data data Harga Satuan Pekerjaan (HSP) proyek konstruksi gedung, Jalan dan jembatan yang akan diolah nantinya.

## 1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang didapatkan dari penelitian ini :

1. Bagaimana pengaruh kenaikan BBM terhadap biaya proyek konstruksi
2. Berapa tingkat persentase kenaikan BBM yang dapat mempengaruhi HSP pada item pekerjaan tertentu dan perlu ditangani?

## 1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kenaikan BBM terhadap harga satuan pekerjaan yang menggunakan alat berat.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mensimulasikan persentase kenaikan BBM terhadap HSP setiap item pekerjaan yang menggunakan alat yang memakai BBM non subsidi.

## 1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebagai pengetahuan bagi para pembaca hubungan persentase kenaikan BBM terhadap biaya konstruksi
2. Sebagai pengetahuan dan referensi bagi pembaca dalam melakukan penelitian yang berhubungan kedepannya

## 1.5 Batasan Masalah

Batasan batasan penelitian ini sebagai berikut :

1. Data yang diolah hanya item item pekerjaan yang menggunakan alat berat yang memakai BBM (Solar non subsidi)
2. Hanya fokus pada bagian kenaikan BBM (Solar non subsidi) sebagai variabel bebas